



RENTA

RENCANA KERJA 2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVISI SULAWESI SELATAN**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan panduan strategis dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja selama tahun 2026, yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta mengacu pada visi, misi, dan tujuan jangka menengah organisasi. Rencana kerja ini memuat arah kebijakan, prioritas program, serta Langkah-langkah taktis yang akan diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim penyusun serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses perencanaan ini.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang lebih baik di tahun 2026.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



DR. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip : 19820306 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...	48
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 69
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	69
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	 72
 BAB V PENUTUP	 86

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapenda dan Pencapaian RENSTRA Bapenda Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Selatan	9	
Tabel 2.2	Target dan Realisasi APBD Pendapatan Daerah Tahun 2026.....		23
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	25	
Tabel T-C. 31	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	51	
Tabel T-C. 32	Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		68
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026	70	
Tabel T-C. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Organisasi (Renstra).

Sebagai penjabaran Renstra, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membuat rencana Pembangunan Tahunan yang biasa disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode selama 1 (satu) Tahun. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (RENJA) tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) dilakukan dalam rangka optimalisasi Pencapaian sasaran Renstra Bapenda.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Pembangunan dan pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (RENJA) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sangat ditentukan oleh kemampuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 adalah memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, antara lain:

1. Menganalisis gambaran pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menelaah hasil evaluasi Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menelaah tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

1.3 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan;
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun-tahun sebelumnya;
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu, dan realisasi Renstar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan/ atau realisasi APBD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

- Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

- Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

- Berisi uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Masyarakat

- Menjelaskan hasil kajian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun lalu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja Renstra Bapenda ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Bapenda dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subb kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Bapenda, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan yang akan ditempuh, maka harus menggunakan strategi dan cara yang disusun secara sistematis, jelas, dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu yang akan dipergunakan. Hal ini sangat penting dalam penentuan penetapan indikator dan target kerja dalam proses penyusunan rencana kerja (RENJA) dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 serta penyusunan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jumlah alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

Gambaran terhadap review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, capaian kinerja input, output dan outcome tahun 2024-2026 diuraikan pada table berikut:

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Bapenda dan Pencapaian RENSTRA Bapenda sampai dengan juni Tahun 2026

Provinsi Sulawesi Selatan

=A5:R101URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				228,953,181,189.0	173,810,645,769.0		48,523,529,850.0		20,720,089,077.0		72,836,302,181.0		41.91		72,836,302,181.0		16.23
KEUANGAN				228,953,181,189.0	173,810,645,769.0		48,523,529,850.0		20,720,089,077.0		72,836,302,181.0		41.91		72,836,302,181.0		16.23
Badan Pendapatan Daerah				0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		60,000,000.0		0.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	100.92			25.23		25.0		50.23		49.77		150.65		49.52	
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	%	79.32	225,660,751,089.0	144,629,571,569.0	19.83	48,502,799,850.0	19.0	20,210,003,964.0	38.83	72,254,894,203.0	48.95	49.96	38.83	72,254,894,203.0	46.68	16.38
	Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	%	83.18			20.80		20.0		40.80		49.05		40.80		46.87	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11.0	2,015,172,100.0	638,311,600.0	2.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	36.36		4.0	0.0	0.0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.0	870,824,000.0	447,675,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.0	198,229,200.0	35,150,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.0	15,015,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.0	142,443,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.0	114,479,500.0	83,246,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

=A5:R101URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1.0	25,380,500.0	5,850,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5.0	648,800,000.0	66,390,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12.0	166,319,591,917.0	112,707,263,643.0	3.0	45,197,272,154.0	3.0	16,447,115,280.0	6.0	64,420,672,266.0	50.0	57.16	6.0	64,420,672,266.0	0.0	19.87
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	530.0	165,958,186,517.0	112,551,624,243.0	530.0	45,197,272,154.0	530.0	16,435,665,280.0	1,060.0	64,409,222,266.0	200.0	57.23	1,060.0	64,409,222,266.0	0.0	19.93
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.0	5,457,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.0	199,616,000.0	103,966,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12.0	9,077,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.0	9,077,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12.0	122,994,700.0	51,672,800.0	3.0	0.0	3.0	11,450,000.0	6.0	11,450,000.0	50.0	22.16	6.0	11,450,000.0	0.0	3.97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12.0	10,816,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.0	4,367,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12.0	276,650,300.0	174,481,900.0	3.0	0.0	3.0	79,037,550.0	6.0	79,037,550.0	50.0	45.30	6.0	79,037,550.0	0.0	14.24
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2.0	91,088,800.0	50,384,300.0	1.0	0.0	0.0	39,277,350.0	1.0	39,277,350.0	50.0	77.96	1.0	39,277,350.0	0.0	16.63
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.0	51,308,000.0	23,636,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1.0	4,433,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

=A5:R101URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	25.0	6,374,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4.0	51,612,000.0	51,612,000.0	1.0	0.0	1.0	39,760,200.0	2.0	39,760,200.0	50.0	77.04	2.0	39,760,200.0	0.0	72.49
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4.0	48,849,000.0	48,849,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2.0	22,985,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12.0	423,305,900.0	131,653,400.0	3.0	0.0	3.0	26,760,000.0	6.0	30,818,450.0	50.0	23.41	6.0	30,818,450.0	0.0	3.08
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	2.0	203,157,200.0	69,581,700.0	1.0	0.0	0.0	11,820,000.0	1.0	14,288,450.0	50.0	20.53	1.0	14,288,450.0	0.0	4.30
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1.0	81,942,300.0	19,663,300.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1,590,000.0	100.0	8.09	1.0	1,590,000.0	0.0	0.69
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4.0	138,206,400.0	42,408,400.0	1.0	0.0	1.0	14,940,000.0	2.0	14,940,000.0	50.0	35.23	2.0	14,940,000.0	0.0	3.42
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Jumlah Dokumen Kepegawaian	%	100.0	2,316,591,700.0	203,348,800.0	25.0	7,135,000.0	25.0	13,755,000.0	50.0	59,120,000.0	50.0	29.07	50.0	59,120,000.0	0.0	1.51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2.0	57,563,000.0	26,186,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	530.0	491,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12.0	55,593,000.0	26,326,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12.0	150,785,600.0	150,485,600.0	3.0	7,135,000.0	3.0	13,755,000.0	6.0	59,120,000.0	50.0	39.29	6.0	59,120,000.0	0.0	13.11
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23.0	1,019,740,000.0	350,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	100.0	523,030,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25.0	18,179,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100.0	8,273,530,800.0	6,249,479,200.0	25.0	66,494,600.0	25.0	336,739,307.0	50.0	431,940,221.0	50.0	6.91	50.0	431,940,221.0	0.0	2.45

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

=A5:R101URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60.0	124,939,600.0	60,004,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.0	111,771,000.0	52,581,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.0	4,460,463,000.0	4,439,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12.0	496,912,000.0	198,708,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.0	2,690,715,800.0	1,239,080,800.0	3.0	34,744,600.0	3.0	246,416,307.0	6.0	309,867,221.0	50.0	25.01	6.0	309,867,221.0	0.0	5.10
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12.0	388,729,400.0	259,605,400.0	3.0	31,750,000.0	3.0	90,323,000.0	6.0	122,073,000.0	50.0	47.02	6.0	122,073,000.0	0.0	15.63
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100.0	16,407,317,200.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	50.0		50.0	0.0	0.0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10.0	1,163,161,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100.0	1,529,739,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3.0	11,341,301,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20.0	1,365,843,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Oedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10.0	1,007,273,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	32.0	25,749,712,928.0	22,059,205,976.0	8.0	3,231,898,096.0	8.0	3,206,793,827.0	16.0	7,133,502,716.0	50.0	32.34	16.0	7,133,502,716.0	0.0	14.93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.0	544,960,000.0	211,060,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.0	10,185,586,538.0	9,187,576,898.0	3.0	1,029,114,064.0	0.0	1,832,215,827.0	3.0	2,915,866,484.0	25.0	31.74	3.0	2,915,866,484.0	0.0	14.85
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.0	642,238,000.0	97,210,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.0	14,376,928,390.0	12,563,359,078.0	3.0	2,202,784,032.0	0.0	1,374,578,000.0	3.0	4,217,636,232.0	25.0	33.57	3.0	4,217,636,232.0	0.0	17.84

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

=A5:R101URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	1,099.0	3,878,878,244.0	2,465,827,050.0	274.0	0.0	###	99,803,000.0	548.0	99,803,000.0	49.86	4.05	548.0	99,803,000.0	0.0	1.17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30.0	502,492,999.0	392,644,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120.0	975,800,200.0	624,098,250.0	30.0	0.0	0.0	99,803,000.0	30.0	99,803,000.0	25.0	15.99	30.0	99,803,000.0	0.0	4.29
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50.0	215,840,000.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	24.0		12.0	0.0	0.0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50.0	1,146,546,000.0	650,750,000.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	24.0		12.0	0.0	0.0	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5.0	605,069,045.0	508,000,000.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	20.0		1.0	0.0	0.0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.0	433,130,000.0	290,334,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												49.26	49.96			47.69	16.38
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100.0	954,502,400.0	331,103,400.0	25.0	0.0	25.0	20,164,700.0	50.0	21,611,730.0	50.0	6.53	50.0	21,611,730.0	50.0	1.19
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Bidang Pendapatan Daerah	%	100.0	484,858,800.0	165,052,000.0	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	1,447,030.0	50.0	0.88	50.0	1,447,030.0	0.0	0.15
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1.0	16,706,600.0	395,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202,728.0	0.0	51.25	0.0	202,728.0	0.0	0.60
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1.0	19,942,600.0	385,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192,252.0	0.0	49.82	0.0	192,252.0	0.0	0.59
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1.0	12,228,700.0	701,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1.0	12,851,000.0	250,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

=A5:R101URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1.0	12,923,200.0	1,249,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,052,050.0	0.0	84.23	0.0	1,052,050.0	0.0	3.85
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1.0	14,327,000.0	944,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1.0	68,897,200.0	24,224,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1.0	102,671,500.0	54,573,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1.0	224,311,000.0	82,326,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Hasil Koordinasi dan Pelaporan Bidang Pendapatan dengan Bidang Terkait	%	100.0	469,643,600.0	166,051,400.0	25.0	0.0	25.0	20,164,700.0	50.0	20,164,700.0	50.0	12.14	50.0	20,164,700.0	0.0	2.35
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12.0	404,015,600.0	141,577,300.0	3.0	0.0	0.0	20,164,700.0	3.0	20,164,700.0	25.0	14.24	3.0	20,164,700.0	0.0	2.72
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2.0	65,628,000.0	24,474,100.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.0		1.0	0.0	0.0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50.0	7.03			50.0	1.19
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan PAD	%	100.0	2,337,927,700.0	28,849,970,800.0	25.0	20,730,000.0	25.0	489,920,413.0	50.0	559,796,248.0	50.0	1.94	50.0	559,796,248.0	50.0	9.59
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12.0	2,337,927,700.0	28,849,970,800.0	3.0	20,730,000.0	3.0	489,920,413.0	6.0	559,796,248.0	50.0	1.94	6.0	559,796,248.0	0.0	9.59
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2.0	512,202,600.0	375,365,800.0	1.0	0.0	0.0	23,796,789.0	1.0	23,796,789.0	50.0	6.34	1.0	23,796,789.0	0.0	2.17
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1.0	218,897,800.0	72,556,200.0	0.0	0.0	0.0	3,985,000.0	0.0	3,985,000.0	0.0	5.49	0.0	3,985,000.0	0.0	1.24

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

=A5:R101URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1.0	66,812,600.0	24,662,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	25.0		2,286,252,700.0	6.0	15,270,000.0	0.0	312,868,980.0	6.0	360,576,515.0	24.0	15.77	6.0		0.0	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12.0		1,202,579,900.0	3.0	0.0	0.0	3,510,000.0	3.0	5,416,800.0	25.0	0.45	3.0		0.0	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12.0	757,789,200.0	21,833,519,200.0	3.0	5,460,000.0	0.0	74,863,000.0	3.0	85,513,000.0	25.0	0.39	3.0	85,513,000.0	0.0	4.31
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan	12.0	108,517,500.0	37,589,300.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1,878,500.0	25.0	5.0	3.0	1,878,500.0	0.0	1.70
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	12.0	185,832,600.0	96,885,600.0	3.0	0.0	0.0	24,327,644.0	3.0	24,327,644.0	25.0	25.11	3.0	24,327,644.0	0.0	4.72
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12.0	230,455,600.0	220,950,800.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	25.0		3.0	0.0	0.0	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	25.0		2,571,873,000.0	6.0	0.0	0.0	35,319,000.0	6.0	43,052,000.0	24.0	1.67	6.0		0.0	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	2.0	58,376,000.0	28,671,800.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.0		1.0	0.0	0.0	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	12.0	126,590,800.0	54,268,500.0	3.0	0.0	0.0	11,250,000.0	3.0	11,250,000.0	25.0	20.73	3.0	11,250,000.0	0.0	2.90
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12.0	72,453,000.0	44,796,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	25.0		3.0	0.0	0.0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50.0	1.94			50.0	9.59
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

Adapun tabel di bawah ini menjelaskan tentang factor-faktor penghambat dan pendorong dalam melakukan pencapaian kinerja serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk triwulan berikutnya, yaitu:

Nama Program	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. kesadaran wajib pajak yang belum optimal 2. kurangnya sosialisasi terkait kebijakan dan prosedur pembayaran pajak yang menyebabkan minimnya partisipasi Masyarakat 3. Tingkat koordinasi antar unit dilapangan belum optimal, sehingga menurunkan efisiensi operasional	1. Implementasi sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik yang meningkatkan kemudahan wajib pajak 2. Adanya komitmen pimpinan serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah mendorong pelaksanaan program kerja 3. Kemitraan strategis dengan instansi terkait akan memperkuat basis data dan proses validasi wajib pajak	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan 2. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala untuk mendukung akurasi target penerimaan 3. Memperkuat sinergi internal antar bidang dan eksternal dengan instansi pendukung guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. keterlambatan pencairan anggaran dibeberapa sub kegiatan yang berdampak pada pelaksana program dan kegiatan 2. terbatasnya anggaran operasional yang menghambat perluasan layanan dan pelaksanaan kegiatan di wilayah terpencil	1. melaksanakan koordinasi internal pada bidang dan upt serta telah tersediaannya SOP disetiap kegiatan	1. melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan serta melaksanakan kegiatan sesuai SOP

Nama Program	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi antar OPD pengelola pendapatan yang belum berjalan secara efektif dan Proses rekonsiliasi data pendapatan yang masih memerlukan waktu lama	Adanya pedoman dan standar operasional prosedur yang jelas dalam pengelolaan pendapatan daerah dan Peningkatan pengawasan internal melalui penguatan peran inspektorat dalam audit pendapatan	Melakukan update dan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk sektor pendapatan, Melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan secara berkala dan tepat waktu dan Memperkuat koordinasi dengan OPD penghasil pendapatan melalui forum koordinasi rutin

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan.

Hal ini dapat dilihat dalam 2 (dua) tahun terakhir Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari kelima sektor pajak yang dikelola Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok.

Dengan berbagai upaya untuk mencapai target penerimaan pajak yang lebih baik, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah mengambil inisiatif berupa peningkatan transaksi secara non tunai, pengembangan layanan unggulan, serta kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan juara pada ajang South Sulawesi Digital Festival dan meraih juara ketiga kategori One Page Summary Contest untuk Pemerintah Daerah yang diberikan atas inovasi pembayaran pajak kendaraan secara digital dan pada tahun 2023 Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapatkan juara ketiga pada ajang South Sulawesi Digital Festival 2023 dengan kategori Aplikasi pembayaran pajak secara digital yang bernama Bapenda Sulsel mobile. Penghargaan tidak hanya datang dari tingkat Provinsi, tetapi juga ditingkat nasional Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga berhasil meraih penghargaan juara pertama dalam penghargaan TP2DD (Tim Pengendalian Pembayaran Pajak Daerah) sebagai provinsi terbaik di kawasan Indonesia Timur

Prestasi-prestasi tersebut menegaskan bahwa kontribusi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam inovasi, dan layanan yang lebih baik serta dalam pengelolaan pajak yang lebih efektif. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang lebih optimal, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk mendorong pembayaran non tunai melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile yang memungkinkan pembayaran pajak melalui perangkat selular dengan payment channel seperti Qris, Gojek, Mobile Banking Bank Sulselbar, LinkAja, Indomaret, dan Tokopedia. Dari berbagai pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi pajak dengan

memperkuat pengawasan internal dan efisiensi melalui aplikasi padaidi, dimana aplikasi ini memungkinkan Kepala Bapenda untuk memantau kinerja pegawai dan realisasi layanan penerimaan pajak dengan lebih terstruktur, yang memungkinkan tindakan lebih cepat dalam mengatasi kendala dan memastikan pelaporan yang akurat.

Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mengembangkan layanan unggulan seperti samsat care, samsat keliling, samsat lorong, dan gerai samsat yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk membayar pajak, meskipun Bapenda fokus pada pembayaran nontunai, opsi pembayaran tunai juga masih tetap tersedia, untuk kebutuhan berbagai kelompok masyarakat serta memberikan insentif pajak sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 yang mencakup penghapusan denda PKB dan BBNKB serta penghapusan progresif yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat pasca pandemi, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Selain itu, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga menjalin kerjasama sinergitas dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan layanan yang lebih baik termasuk kerjasama dengan kepolisian daerah Sulsel dalam penertiban kendaraan bermotor dan penagihan pajak secara door to door serta kerjasama dengan DPMPTSP untuk verifikasi bebas tunggakan pajak sebelum perizinan diterbitkan, selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Bank Sulselbar melalui aplikasi Sipijar yang dapat membantu perluasan dan percepatan digitalisasi pembayaran pajak daerah (P2DD) serta memberikan insentif bagi wajib pajak dalam pembayaran PKB dan pembukaan tabungan pajak.

Semua kerjasama ini mendukung efisiensi dan kesinambungan penerimaan pajak, langkah-langkah ini tercermin dalam data realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2023 sampai 2024 sampai bulan Juni, yang dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi APBD Pendetapan Daerah Sampai dengan Bulan Juni
Tahun 2026

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TA.2025 (Rp)	REALISASI S/D BULAN MEI	REALISASI BULAN JUNI	REALISASI S/D BULAN JUNI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	9,801,536,113,749.00	3,455,228,239,069.56	910,873,570,818.71	4,366,101,809,888.27	44.55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,007,326,476,749.00	1,806,498,966,813.56	425,199,406,991.71	2,231,698,373,805.27	44.57
4.1.01	PAJAK DAERAH	4,164,485,496,517.00	1,447,807,689,322.70	246,439,912,444.00	1,694,247,601,766.70	40.68
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,209,317,833,000.00	432,241,696,971.00	87,506,329,109.00	519,748,026,080.00	42.98
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	726,478,467,000.00	248,772,906,124.00	58,652,710,953.00	307,425,617,077.00	42.32
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1,134,978,651,000.00	390,527,272,484.00	77,343,421,728.00	467,870,694,212.00	41.22
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	242,108,829,000.00	81,017,195,086.00	17,351,137,172.00	98,368,332,258.00	40.63
4.1.01.05	Pajak Rokok	769,814,648,517.00	276,788,694,873.00	0	276,788,694,873.00	35.96
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	2,777,523,000.00	301,192,240.00	8,850,000.00	310,042,240.00	11.16
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	79,009,545,000.00	18,158,731,544.70	5,577,463,482.00	23,736,195,026.70	30.04
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	307,051,041,976.00	140,646,060,511.00	30,258,827,908.00	170,904,888,419.00	55.66
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	274,747,700,001.00	130,997,937,475.00	27,169,283,283.00	158,167,220,758.00	57.57
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	32,153,341,975.00	9,548,553,036.00	3,030,889,825.00	12,579,442,861.00	39.12
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	150,000,000.00	99,570,000.00	58,654,800.00	158,224,800.00	105.48
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	137,925,289,386.00	0	140,018,914,515.00	140,018,914,515.00	101.52

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TA.2025 (Rp)	REALISASI S/D BULAN MEI	REALISASI BULAN JUNI	REALISASI S/D BULAN JUNI	%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	135,500,569,386.00	0	140,018,914,515.00	140,018,914,515.00	103.33
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2,424,720,000.00	0	0	0	0
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	397,864,648,870.00	218,045,216,979.86	8,481,752,124.71	226,526,969,104.57	56.94
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	228,000,000.00	1,603,600,000.00	0	1,603,600,000.00	703.33
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	300,000,000.00	125,000,000.00	25,000,000.00	150,000,000.00	50
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	3,738,916,443.00	931,732,150.00	767,768,617.00	1,699,500,767.00	45.45
4.1.04.05	Jasa Giro	27,014,619,632.00	5,928,929,835.00	1,789,557,790.00	7,718,487,625.00	28.57
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	3,981,382,035.86	662,100,726.71	4,643,482,762.57	0
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	181,440,658,084.00	747,701,535.00	182,188,359,619.00	0
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0	0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	193,756,038,000.00	24,021,129,191.00	4,489,161,956.00	28,510,291,147.00	14.71
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	12,000,000.00	10,035,684.00	461,500.00	10,497,184.00	87.48
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	172,815,074,795.00	2,750,000.00	0	2,750,000.00	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,785,387,793,000.00	1,648,264,504,312.00	485,396,017,267.00	2,133,660,521,579.00	44.59
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,785,387,793,000.00	1,648,264,504,312.00	485,396,017,267.00	2,133,660,521,579.00	44.59
4.2.01.06	Insentif Fiskal	30,573,393,000.00	15,286,696,500.00	0	15,286,696,500.00	50
4.2.01.06.03	3 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	30,573,393,000.00	15,286,696,500.00	0	15,286,696,500.00	50

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TA.2025 (Rp)	REALISASI S/D BULAN MEI	REALISASI BULAN JUNI	REALISASI S/D BULAN JUNI	%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	306,507,794,000.00	89,820,594,700.00	36,109,883,400.00	125,930,478,100.00	41.09
4.2.01.07.01	DBH Pajak	240,733,305,000.00	60,183,139,000.00	36,109,883,400.00	96,293,022,400.00	40
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	61,698,518,000.00	27,599,470,200.00	0	27,599,470,200.00	44.73
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4,075,971,000.00	2,037,985,500.00	0	2,037,985,500.00	50
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,919,993,953,000.00	1,126,829,988,000.00	187,850,428,000.00	1,314,680,416,000.00	45.02
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	2,254,205,144,000.00	1,126,829,988,000.00	187,850,428,000.00	1,314,680,416,000.00	58.32
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	665,788,809,000.00	0	0	0	0
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,528,312,653,000.00	416,327,225,112.00	261,435,705,867.00	677,762,930,979.00	44.35
4.2.01.09.01	DAK Fisik	142,127,296,000.00	5,089,260,700.00	0	5,089,260,700.00	3.58
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	1,386,185,357,000.00	411,237,964,412.00	261,435,705,867.00	672,673,670,279.00	48.53
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8,821,844,000.00	464,767,944.00	278,146,560.00	742,914,504.00	8.42
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	8,821,844,000.00	464,767,944.00	278,146,560.00	742,914,504.00	8.42
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4,565,844,000.00	0	0	0	0
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	4,256,000,000.00	464,767,944.00	278,146,560.00	742,914,504.00	17.46

Selain inovasi yang telah dilaksanakan di atas, secara berkelanjutan Bapenda juga melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur laki-laki dan perempuan pengelola administrasi pendapatan daerah, SDM operator sistem dan operator data serta SDM pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu kepada wajib pajak dilakukan sosialisasi dan penertiban pajak, serta dilakukan himbauan atau penagihan pajak kepada masyarakat wajib pajak yang terlambat membayar kewajiban pajaknya.

Perhitungan potensi yang ada serta pemanfaatannya sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana mestinya akibat kurangnya ketersediaan data.

Di masa depan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, hasil kajian tentang potensi pendapatan asli daerah merupakan landasan dalam menetapkan sasaran perangkat daerah dan target pendapatan daerah. Tabel dibawah menunjukkan capaian realisasi kinerja sasaran Renstra serta proyeksi kedepannya, sebagai berikut:

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Badan Pendapatan Daerah														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			org/bln	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target pendapatan perangkat daerah			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah			Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			orang	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan Umum Kantor			%	100	100	100	100	100		100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			paket	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			paket	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			paket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD			%	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			paket	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			unit	0	0	25	25	25	25	0	25	25	25
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			unit	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			unit	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			unit	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Unit	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			unit	5	5	5	6	6		5	5	6	6
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian realisasi pendapatan asli daerah diluar pajak daerah			%	100	100	100	100	100		100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah rencana target pendapatan asli daerah diluar pajak daerah yang tervalidasi			Perangkat Daerah	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			Dokumen	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			Dokumen	1	1	1	0	1		1	1	0	1
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			Dokumen	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			Dokumen	1	1	1	1	1		1	1	1	1

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi			Dokumen	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			Dokumen	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase laporan pendapatan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi yang tervalidasi			%	100	100	100	100	100		100	100	100	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			Laporan	12	12	12	12	-		12	12	12	-
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian realisasi pajak daerah			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pajak daerah			Rp	4.333.746.209.642	4.333.746.209.642	4.333.746.209.642	4.333.746.209.642	#4.333.746.209.642	4.333.746.209.642	4.333.746.209.642	4.333.746.209.642	4.333.746.209.642	4.333.746.209.642
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Sarana dan Prasarana	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			Dokumen Ketetapan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SPM/ STANDA R NASION AL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA PENDAPATAN DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4		9	5	6	7	8		9	10	11	12
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			Dokumen SSPD	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti			Dokumen surat oersetujuan/penol akan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kontribusi PAD Terhadap APBD Masih rendah yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda, maka isu permasalahan yang di hadapi Bapenda dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajaknya tepat waktu.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, penyuluhan/ sosialisasi untuk memberi kesadaran/kepatuhan masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Kesadaran ini sangat dibutuhkan agar anggaran yang digunakan untuk pemungutan pajak dapat ditekan sehingga pendapatan daerah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara mencakup reformasi dibidang pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang paling besar yaitu pola pikir, pola tindak, tata busana serta tutur kata dalam berkomunikasi.

2. Belum optimalnya sumber daya perangkat daerah.

Paradigma masyarakat terhadap sulitnya mengurus pajak maupun membayar pajak masih ada. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur Bapenda serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapatkan perhatian yang serius. Disamping itu, masyarakat perlu diberikan kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan adakah benar-benar untuk memajukan pembangunan daerah. Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang profesional;
- b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggungjawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

3. Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi

Prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, Bapenda harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan masyarakat. Selain meningkatkan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi tuntutan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja).

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik dari segi jumlah program, jumlah kegiatan, dan jumlah sub kegiatan, target indikator, serta pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan serta telah dilakukan review pembahasan dan verifikasi serta finalisasi pemetaan program dan kegiatan serta subkegiatan.

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Badan Pendapatan Daerah				Rp176,624,443,967.00	Badan Pendapatan Daerah				Rp 186,721,983,464.40	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Makassar	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Rp147,443,362,175.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Makassar	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Rp 157,536,931,294.40	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	100%	Rp 638,311,600.00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	100%	Rp 352,253,580.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	447,675,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 144,246,100.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	30,150,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	Rp 35,150,600.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	Rp 4,805,910.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 12,776,970.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	70,246,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 83,246,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,850,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 5,850,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	66,390,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp 66,178,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100%	Rp 114,521,054,249.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100%	Rp 129,644,268,392.40	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	530 Orang/ Bulan	114,365,414,849.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	530 Orang/ Bulan	Rp 129,489,119,392.40	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103,966,600.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 103,842,600.00	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	51,672,800.00	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Rp 51,306,400.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik	100%	Rp 174,481,900.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik	100%	Rp 174,035,770.00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	50,384,300.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	50,383,000.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	23,636,600.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	23,586,600.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	51,612,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	51,274,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	48,849,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	48,792,170.00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Capaian Target Pendapatan Perangkat Daerah	100%	Rp 131,653,400.00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Capaian Target Pendapatan Perangkat Daerah	100%	Rp 132,245,800.00	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	69,581,700.00	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	70,213,700.00	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	19,663,300.00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	19,627,500.00	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	42,408,400.00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	42,404,600.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 203,348,800.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 203,298,800.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	26,186,600.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	26,136,600.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	26,326,600.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	26,326,600.00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	150,485,600.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	150,485,600.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	350,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	350,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Penyediaan Layanan Umum Kantor	100 %	Rp 6,249,479,200.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Penyediaan Layanan Umum Kantor	100%	Rp 5,876,583,790.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60,004,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	59,946,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52,581,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50,394,300.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4,439,500,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4,119,178,000.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	198,708,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	198,688,000.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,239,080,800.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,270,784,800.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	259,605,400.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	177,592,690.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Pengadaan BMD	100 %	Rp 1,000,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Pengadaan BMD	100 %	Rp 841,004,242.00	
Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200,000,000.00	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	199,178,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	500,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	491,747,000.00	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100,000,000.00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1,723,242.00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	74,178,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	74,178,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	Rp 22,059,205,976.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	Rp 18,100,757,678.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	211,060,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	211,055,600.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,187,576,898.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,187,510,398.00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97,210,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	94,046,200.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,563,359,078.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8,608,145,480.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase terpeliharanya BMD	100%	Rp 2,465,827,050.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase terpeliharanya BMD	100%	Rp 2,212,483,242.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	392,644,800.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	427,679,400.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	624,098,250.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	681,594,600.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	650,750,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	496,580,000.00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	508,000,000.00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	503,552,242.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	290,334,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	103,077,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Makassar	Persentase Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Diliuar Pajak Daerah	100 %	Rp 331,103,400.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Makassar	Persentase Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Diliuar Pajak Daerah	100 %	Rp 343,477,200.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Makassar	Jumlah Rencana Target Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah yang Tervalidasi	31 Perangkat Daerah	Rp 165,052,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Makassar	Jumlah Rencana Target Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah yang Tervalidasi	31 Perangkat Daerah	Rp 169,259,700.00	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Makassar	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 395,600.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Makassar	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 402,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Makassar	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 24,224,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Makassar	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 415,400.00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Makassar	dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 54,573,400.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Makassar	dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 716,800.00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Makassar	dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 385,900.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Makassar	dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 265,900.00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Makassar	dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 82,326,300.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Makassar	dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 1,284,000.00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Makassar	dokumen perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 1,249,000.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Makassar	dokumen perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 955,300.00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 944,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 24,438,600.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 250,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 56,277,400.00	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Makassar	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1 dokumen	Rp 701,500.00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Makassar	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1 dokumen	Rp 84,504,300.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Makassar	Persentase laporan Pendapatan Perangkat Daerah Lngkup Pemerintah Provinsi yang Tervalidasi	100%	Rp 166,051,400.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Makassar	Persentase laporan Pendapatan Perangkat Daerah Lngkup Pemerintah Provinsi yang Tervalidasi	100%	Rp 174,217,500.00	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Makassar	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkondolidasi	12 laporan	Rp 141,577,300.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Makassar	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkondolidasi	12 laporan	Rp 149,628,500.00	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Makassar	jumlah rancangan peraturan daerah tentang oertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi	2 Dokumen	Rp 24,474,100.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Makassar	jumlah rancangan peraturan daerah tentang oertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi	12 Laporan	Rp 24,589,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	100%	Rp 28,849,978,392.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	100%	Rp 28,841,574,970.00	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Capaian Pajak Daerah (Rp)	Rp 4.333.746.209.642	Rp 28,849,978,392.00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Capaian Pajak Daerah (Rp)	Rp 4.333.746.209.642	Rp 28,841,574,970.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	375,365,800.00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Rp 375,365,650.00	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	72,556,200.00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 71,925,200.00	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	24,662,000.00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 24,621,600.00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25 Sarana dan Prasarana	Rp 2,301,338,340.00	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1,202,579,900.00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Rp 1,171,651,590.00	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	21,833,526,792.00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	Rp 21,837,266,850.00	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Rp 31,170,410.00	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan Dana					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	96,885,600.00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Rp 96,885,400.00	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	220,950,800.00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	Rp 220,947,100.00	
Penagihan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	25 Dokumen SSPD	2,571,873,000.00	Penagihan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	25 Dokumen SSPD	Rp 2,582,848,330.00	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	Rp 28,657,300.00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	54,268,500.00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Rp 54,171,200.00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	44,796,000.00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Rp 44,726,000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya juga memperhatikan usulan dari masyarakat karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diperoleh dari Musrembang dimana semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dilakukan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Namun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi perangkat Daerah yang hanya menunjang tugas dan fungsi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak terlibat secara langsung dalam tugas-tugasnya dan kegiatannya yang dijalankannya dengan masyarakat, tetapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hanya menjalankan kegiatannya agar masyarakat sadar akan kewajibannya membayar pajak untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Bapenda tahun 2026 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel T-C. 32
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terutama pada pasal 27 ayat 2 yaitu Rancangan Renja- SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan Akhir RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, telah menjadi acuan utama bagi satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja tahunnya.

Kemudian pasal 23 ayat 4 pada peraturan ini juga mempertegas hal tersebut, yaitu bahwa RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan adanya aturan perundangan tersebut maka Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang terkait dengan program dan kegiatan dibidang pendapatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi.

Selain itu visi Presiden dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

Berdasarkan visi tersebut ditemukan keterkaitan dengan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan sehingga tidak terlalu membebani keuangan pemerintah pusat.

Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga menjadi tujuan dari rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tiap tahunnya.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi harus mampu bekerja untuk

meningkatkan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui inovasi-inovasi dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Bapenda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu 3 (tiga) tahun yang akan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan maka Bapenda menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel dibawah ini menunjukkan Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan beserta target yang akan dicapai pada tahun 2026, yaitu:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2026

No	Tujuan BAPENDA Tahun 2024-2026	Sasaran BAPENDA Tahun 2024-2026	Indikator Tujuan / sasaran	Target 2026
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah		Tingkat Kemandirian daerah (%)	52.55
a.		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah per Tahun (%)	6.04
b.		Meningkatnya Akuntabilitas Bependa	Nilai SAKIP Bapenda	81

3.3. Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 maka program dan kegiatan dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk operasional. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional merupakan tanggungjawab Perangkat daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yaitu:

1. Program Operasional yang terdiri dari:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Strategis yang terdiri dari:
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya *mis-interpretasi*, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa RKPD tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan pelaksanaan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan).

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indikator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang menggambarkan tolak ukur kinerja atau target yang diinginkan untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakn, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk anggaran tahun 2026, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Badan Pendapatann Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PENDAPATAN DAERAH				Rp 176,624,443,967.00				Rp 179,508,579,338.00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp 176,624,443,967.00				Rp 179,508,579,338.00
KEUANGAN				Rp 176,624,443,967.00				Rp 179,508,579,338.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	Makassar	100%	Rp 147,443,362,175.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 150,327,497,546.00
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	Makassar	100%	Rp 638,311,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 638,311,600.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	2 Dokumen	447,675,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	447,675,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	30,150,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	30,150,600.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	13,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	13,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	70,246,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	70,246,000.00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	1 Laporan	5,850,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,850,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	5 Laporan	66,390,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	66,390,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	Makassar	100%	Rp 114,521,054,249.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 117,405,189,620.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	530 Orang/ Bulan	114,365,414,849.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		530 Orang/ Bulan	117,249,550,220.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	12 Dokumen	103,966,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	103,966,600.00
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Makassar	12 Dokumen	51,672,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	51,672,800.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik	Makassar	100%	Rp 174,481,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 174,481,900.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	2 Dokumen	50,384,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	50,384,300.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	1 Dokumen	23,636,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	23,636,600.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	4 Laporan	51,612,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	51,612,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	4 Laporan	48,849,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	48,849,000.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Perangkat Daerah	Makassar	100%	Rp 131,653,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 131,653,400.00
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	2 Dokumen	69,581,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	69,581,700.00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	1 Laporan	19,663,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	19,663,300.00
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Makassar	4 Laporan	42,408,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	42,408,400.00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	100 %	Rp 203,348,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	Rp 203,348,800.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	2 Unit	26,186,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	26,186,600.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	12 Dokumen	26,326,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	26,326,600.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	12 Dokumen	150,485,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	150,485,600.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Makassar	10 Orang	350,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	350,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Umum Kantor	Makassar	100 %	Rp 6,249,479,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	Rp 6,249,479,200.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	4 Paket	60,004,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	60,004,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	4 Paket	52,581,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	52,581,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar	3 Paket	4,439,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	4,439,500,000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	12 Laporan	198,708,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	198,708,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	12 Laporan	1,239,080,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,239,080,800.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	12 Dokumen	259,605,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	259,605,400.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD	Makassar	100 %	Rp 1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	Rp 1,000,000,000.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	1 Paket	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	200,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Makassar	25 Unit	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	500,000,000.00
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Makassar	1 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100,000,000.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar	1 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100,000,000.00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar	1 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100,000,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Makassar	100%	Rp 22,059,205,976.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 22,059,205,976.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	12 Laporan	211,060,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	211,060,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	9,187,576,898.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	9,187,576,898.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	97,210,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	97,210,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	12,563,359,078.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	12,563,359,078.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD	Makassar	100%	Rp 2,465,827,050.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 2,465,827,050.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar	30 Unit	392,644,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	392,644,800.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	30 Unit	624,098,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	624,098,250.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar	50 Unit	650,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	650,750,000.00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Makassar	5 Unit	508,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	508,000,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar	1 Unit	290,334,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	290,334,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Diluar Pajak Daerah	Makassar	100 %	Rp 331,103,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	Rp 331,103,400.00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rencana Target Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah yang Tervalidasi	Makassar	31 Perangkat Daerah	Rp 165,052,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Perangkat Daerah	Rp 165,052,000.00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Makassar	1 dokumen	Rp 395,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	395,600.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Makassar	1 dokumen	Rp 24,224,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	24,224,700.00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	Makassar	1 dokumen	Rp 54,573,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	54,573,400.00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Makassar	1 dokumen	Rp 385,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	385,900.00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	Makassar	1 dokumen	Rp 82,326,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	82,326,300.00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	dokumen perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Makassar	1 dokumen	Rp 1,249,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	1,249,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Makassar	1 Dokumen	Rp 944,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	944,800.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Makassar	1 Dokumen	Rp 250,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250,800.00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Makassar	1 dokumen	Rp 701,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	701,500.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan Pendapatan Perangkat Daerah Lngkup Pemerintah Provinsi yang Tervalidasi	Makassar	100%	Rp 166,051,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 166,051,400.00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkondolidasi	Makassar	12 laporan	Rp 141,577,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	141,577,300.00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi	jumlah rancangan peraturan daerah tentang oertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi	Makassar	2 Dokumen	Rp 24,474,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	24,474,100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	100%	Rp 28,849,978,392.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp 28,849,978,392.00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pajak Daerah (Rp)	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp4,333,746,209,642.00	Rp 28,849,978,392.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		#####	Rp 28,849,978,392.00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Makassar	2 Dokumen	375,365,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	375,365,800.00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	1 Laporan	72,556,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	72,556,200.00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	1 Laporan	24,662,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	24,662,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	1,202,579,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,202,579,900.00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Makassar	12 Laporan	21,833,526,792.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	21,833,526,792.00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Makassar	12 Laporan	96,885,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	96,885,600.00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Makassar	12 Dokumen	220,950,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	220,950,800.00
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Provinsi Sulawesi Selatan	25 Dokumen SSPD	2,571,873,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Dokumen SSPD	2,571,873,000.00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Makassar	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Makassar	12 Laporan	54,268,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	54,268,500.00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Makassar	12 Laporan	44,796,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	44,796,000.00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD).

Oleh sebab itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2026, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Rencana Kerja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan.

Untuk tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan pelaksanaan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp 274.656.003.333,00** (seratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam rupiah).

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman bagi Bapenda dalam menyusun Rencana Anggaran (RKA) tahun 2026.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 yang dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. RENJA-PD Tahun 2026 ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2026;

2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bagian lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib menjadikan dokumen RENJA ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2026;
4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan RENJA secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama tahun 2026.

Berdasarkan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh Bidang, Sekretariat, dan UPT Pendapatan Lingkup Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi bagian perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Membentuk aparat profesional yang meliputi sikap yang integritas, disiplin, dan berkompetensi;
3. Memaksimalkan inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik serta saran yang membangun demi terciptanya sasaran yang di inginkan sesuai dengan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 agar dapat mendukung keberhasilan terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Makassar, 15 Juli 2026



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Reza Faisal Saleh

DR. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b

Nip : 19820306 200012 1 001